



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I       PENDAHULUAN
  - b. BAB II       HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
  - c. BAB III      TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV      RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - e. BAB IV      PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 57 TAHUN 2025  
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026





PEMERINTAH  
KOTA BATAM

WELCOME TO BATAM

# RENCANA KERJA TAHUN 2026

PROFESIONAL  
RESPONSIF  
INOVATIF  
MELAYANI  
AKUNTABEL

DUKCAPIL  
PRIMA

DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL

IDENTITAS  
KEPENDUDUKAN  
DIGITAL



IKD

IS

INDONESIA'S  
FUTURE

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026.

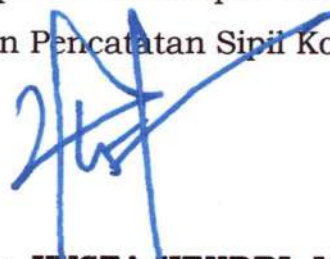
Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang urusan Administrasi Kependudukan, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, September 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kota Batam



**Drs. YUSFA HENDRI, M.Si**

NIP. 19690913 199002 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah .....	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah .....	1
1.1.3 Keterkaitan Antara Rencana Perangkat Daerah dengan ... Dokumen Perencanaan Lainnya	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.. TAHUN LALU .....</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat . Daerah .....	18
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah .....	19
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan .....	19
2.3.3 Tantangan dan Peluang .....	20
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah ..	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>32</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	35
3.3 Program dan Kegiatan .....	36
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. 47</b>	
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
5.1 Catatan Penting .....	56
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....	56
5.3 Rencana Tindak Lanjut .....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 .....	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam .....	18
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Batam .....	23
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Batam .....	31
Tabel 3.1	Target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026 .....	35
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah ... Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Batam .....	38
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja .....	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen ..... Perencanaan Lainnya .....	2

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

### **1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Di dalam Renja berisikan juga evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

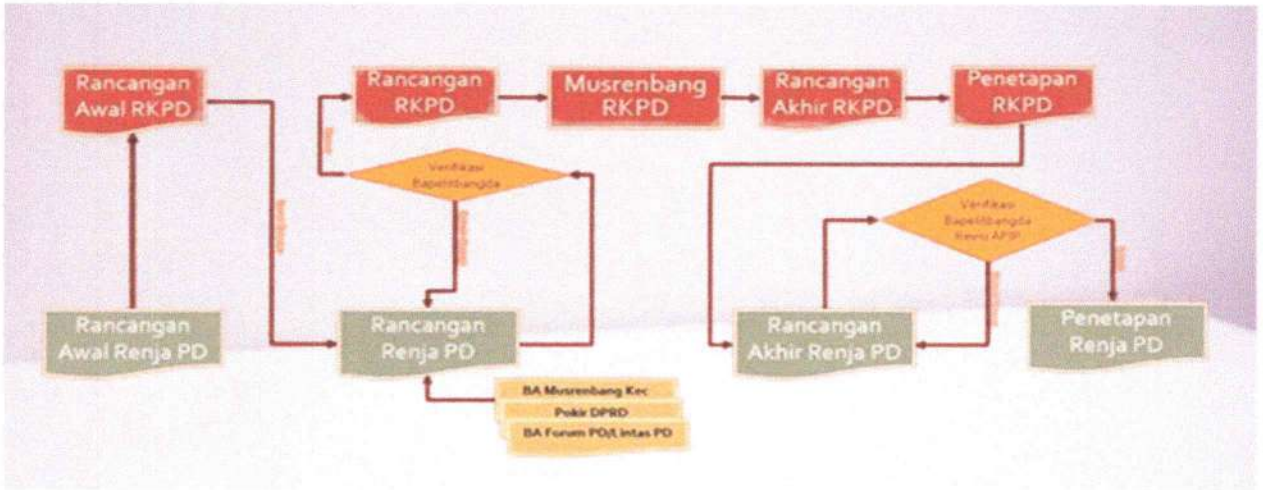
### **1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja

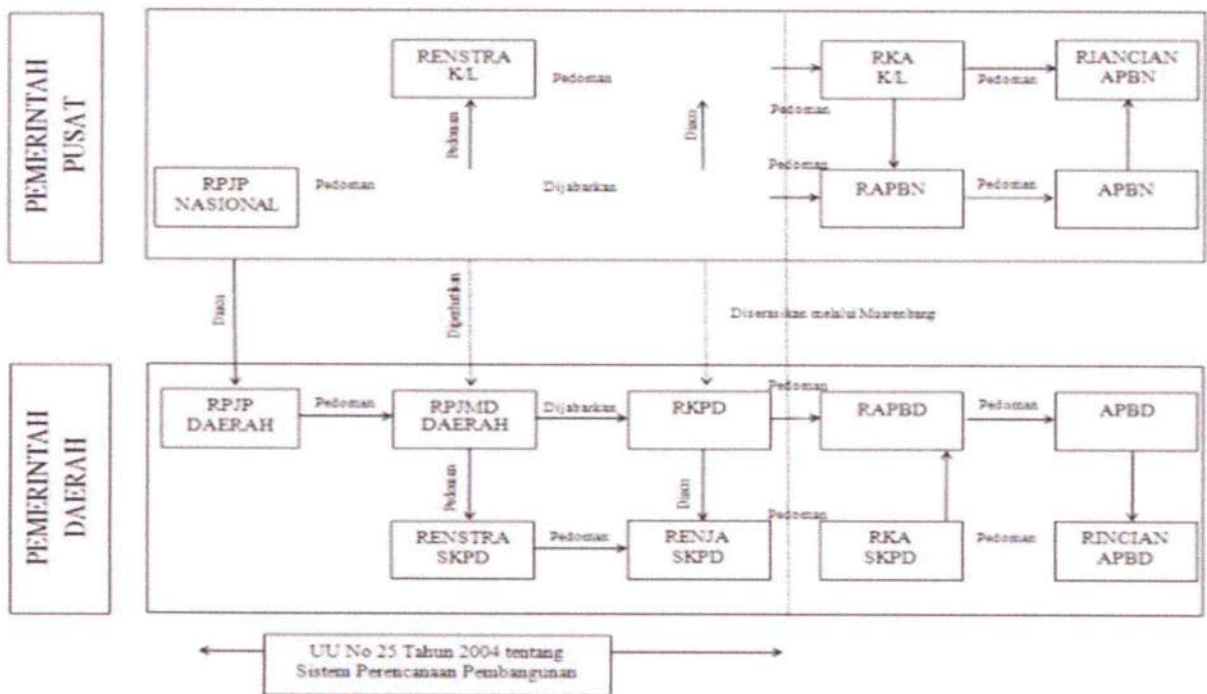


**1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, serta melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 177);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tahun 2016 Nomor 80);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67).
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepri Tahun 2025 No.3, Tambahan Lembaran Daerah No.69);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
33. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 918);
34. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);
35. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1614)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan 2026, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang

ada di Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2026.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), landasan hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

##### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional (3.1). tujuan dan sasaran renja perangkat daerah (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2026 yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2026.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2026.

##### **BAB V PENUTUP**

Memuat tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tidak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - Program Pencatatan Sipil Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, dari target fisik yaitu 38.000 Dokumen mencapai 30.710 Dokumen Akta Kelahiran.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - Program Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, dari target fisik yaitu 135.000 Dokumen mencapai 146.425 Dokumen;
  - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan, dari target fisik yaitu 31 Perangkat Daerah mencapai 31 Perangkat Daerah;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :
  - Program Pencatatan Sipil di Kota Batam dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi masuk sebagai kawasan industri dan perdagangan. Kondisi ini menyebabkan masih terdapat anak usia 0–18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran, tetapi datanya belum tercatat dalam biodata penduduk. Selain itu, rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur administrasi kependudukan, khususnya terkait kepemilikan Akta Pencatatan Sipil, turut menjadi kendala.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
  - Dengan tidak tercapainya target program dimaksud maka berakibat pada belum tercapainya kualitas Pelayanan Prima, Integritas dan Profesional.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1** Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Urusan : Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>									
	<b>Bidang Urusan : Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>									
<b>2.12.01</b>	<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD</b>	<b>78,61% 100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>2.12.01.2.01</b>	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.01.0001	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.01.0007	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.01.2.02	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan</b>	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.12.01.2.02.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/Bulan	-	-	-	-	79 Orang/Bulan	105 Orang/Bulan	100%
2.12.01.2.02.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.12.01.2.05	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya</b>	100 %	-	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.05.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.05.0009	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	-	-	-	-	20 Orang	3 Orang	100%
2.12.01.2.06	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</b>	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.12.01.2.06.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.01.2.06.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	4 Paket	4 Paket	100%
2.12.01.2.06.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
2.12.01.2.06.0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
2.12.01.2.06.0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.12.01.2.07	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.12.01.2.07.0005	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	-	-	-	-	32 Unit	32 Unit	100%
2.12.01.2.07.0006	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	-	-	-	-	79 Unit	79 Unit	100%
2.12.01.2.08	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.01.2.08.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.12.01.2.08.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.12.01.2.08.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.12.01.2.09	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</b>	<b>100 %</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.12.01.2.09.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
2.12.01.2.09.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%
2.12.01.2.09.0006	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	-	-	-	-	100 Unit	100 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.01.2.09.0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
2.12.02	<b>Program : Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan</b>	70 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.12.02.2.01	<b>Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan</b>	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.12.02.2.01.0001	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.12.02.2.01.0002	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	195000 Dokumen	-	-	-	-	160.000 Dokumen	160.000 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.02.2.02	<b>Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase penataan dokumen pendaftaran penduduk yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</b>	100 %	-	-	-	-	-	-	
2.12.02.2.02.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	33800 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
2.12.02.2.03	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	100 %	-	-	-	100%	100%	100%	
2.12.02.2.03.0005	Sub Kegiatan : Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	
2.12.03	<b>Program : Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan</b>	99,584 %	-	-	-	99,50%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.03.2.01	<b>Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan</b>	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.12.03.2.01.0001	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	34802 Dokumen	-	-	-	-	42.000 Dokumen	42.000 Dokumen	100%
2.12.03.2.02	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.12.03.2.02.0008	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.12.04	<b>Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan</b>	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.12.04.2.01	<b>Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Persentase pemangku kepentingan yang memanfaatkan dokumen dan data kependudukan melalui kerjasama</b>	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.04.2.01.0002	Sub Kegiatan : Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	18 Dokumen	-	-	-	-	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
2.12.04.2.03	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.12.04.2.03.0005	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.12.04.2.04	<b>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Terealisasi	100 %	-	-	-	-	-	-	-
2.12.04.2.04.0003	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.12.05	<b>Program : Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan</b>	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.12.05.2.01	<b>Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase profil kependudukan yang berhasil disusun dalam satu periode (tahun) waktu oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan</b>	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.12.05.2.01.0002	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	100 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2** Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Tujuan											
	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</b>			3,68	3,7	3,72	3,74	3,68	3,7	3,72	3,74	
2	Sasaran											
	<b>Indeks kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			92,10	92,13	92,16	92,18	92,10	92,13	92,16	92,18	
	<b>Persentase Kepemilikan Dokumen Kepndudukan dan Pencatatan Sipil</b>											
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital		√	5,46%	9,00%	12,00%	14,00%	5,46%	9,00%	12,00%	14,00%	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		√	58,05%	63,00%	68,00%	73,00%	58,05%	63,00%	68,00%	73,00%	
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		√	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		√	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		√	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan		√	97,23%	97,40%	97,50%	97,60%	97,23%	97,40%	97,50%	97,60%	
	<b>Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif memanfaatkan Dokumen dan Informasi Kependudukan</b>											
	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun		√	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan**

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### **A. Permasalahan Internal**

1. Tertib administrasi kependudukan belum berjalan optimal, yang ditunjukkan oleh rendahnya cakupan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Kuantitas dan kualitas SDM pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum terpenuhi;
  - b. SOP dalam proses pelayanan masih perlu dievaluasi dan disempurnakan;
  - c. Infrastruktur teknologi informasi perlu dimodernisasi untuk mendukung digitalisasi layanan administrasi kependudukan;
  - d. Sarana masih terbatas dan prasarana fasilitas pelayanan administrasi kependudukan belum optimal; dan
  - e. Koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum berjalan optimal.
2. Belum optimalnya kualitas data kependudukan yang ditandai dengan rendahnya kerjasama dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan

#### **B. Permasalahan Eksternal**

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan;

2. Lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap praktik percaloan dalam pelayanan administrasi kependudukan;
3. Terbatasnya akses informasi mengenai prosedur pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di daerah kepulauan; dan
4. Tingginya arus migrasi penduduk ke Kota Batam yang berdampak pada peningkatan beban layanan administrasi kependudukan.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya kerangka hukum yang jelas menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Kebijakan strategis pemerintah mempercepat pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital;
3. Koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak stakeholder, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kekuatan utama dalam mendukung kelancaran pelayanan;
4. Infrastruktur teknologi informasi yang memadai mendukung terwujudnya layanan kependudukan yang terintegrasi melalui SIAK;
5. Tersedianya database kependudukan yang akurat yang dibutuhkan oleh berbagai institusi atau lembaga lain untuk mendukung keputusan dan kebijakan;
6. Komitmen pimpinan yang tinggi mendorong peningkatan kualitas pelayanan prima administrasi kependudukan.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Keterbatasan SDM berkualitas menghambat optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan;
2. Koordinasi internal maupun eksternal yang belum optimal mengurangi efektivitas penanganan layanan kependudukan;
3. Distribusi pelayanan administrasi kependudukan masih belum merata;
4. Ketergantungan pada sistem digital yang sering mengalami gangguan teknis menghambat kelancaran layanan;
5. Fasilitas pendukung yang terbatas menghambat pelayanan kepada masyarakat.
6. Minimnya program pelatihan berkelanjutan menyebabkan peningkatan kompetensi SDM tidak konsisten.

### 2.3.3 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yaitu:

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima menjadi tantangan karena menuntut inovasi, efisiensi, dan standar layanan yang tinggi untuk memenuhi harapan publik;
2. Dinamika perkembangan kehidupan masyarakat menjadi tantangan karena menuntut penyesuaian berkelanjutan dalam penyediaan layanan publik yang relevan dan berkualitas.
3. Masih terdapat persepsi di kalangan sebagian masyarakat Kota Batam bahwa dokumen pencatatan sipil dan administrasi kependudukan belum menjadi kebutuhan yang mendesak dan penting;
4. Sebagian masyarakat masih memanfaatkan jasa perantara tidak resmi (*calo*) dalam mengurus layanan administrasi kependudukan yang sebenarnya disediakan secara gratis oleh pemerintah.

Di samping peluang, terdapat tantangan terdapat pula beberapa peluang yang dikembangkan dalam mengembangkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yaitu:

1. Kebijakan pemerintah memberikan peluang strategis bagi Disdukcapil Kota Batam untuk mewujudkan pelayanan prima, integritas, dan profesionalisme.
2. Pemanfaatan teknologi digital membuka peluang menghadirkan layanan *online*, arsip elektronik, dan aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang memudahkan akses masyarakat.
3. Kerja sama antar-*stakeholder* menjadi peluang untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
4. Pelibatan masyarakat dalam edukasi memberi peluang untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya dokumen kependudukan.
5. Pengembangan inovasi layanan publik menjadi peluang untuk menjangkau masyarakat lebih luas melalui program jemput bola, layanan komunitas, dan *one stop service*.

#### **2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan terselenggaranya layanan administrasi kependudukan (*adminduk*) yang inklusif, akurat, dan berbasis teknologi informasi. Potensi utama yang dimiliki adalah penyelenggaraan layanan berbasis TIK serta ketersediaan data kependudukan yang dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan lintas sektor. Namun, di sisi lain, permasalahan mendasar yang dihadapi masih berupa belum optimalnya tertib administrasi kependudukan, kualitas data yang belum sepenuhnya akurat, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemutakhiran data.

Dari perspektif Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), terdapat tantangan berupa ketimpangan akses dan kualitas layanan *adminduk*, khususnya di wilayah hinterland Batam yang sulit dijangkau. Hal ini berimplikasi pada keberlanjutan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 16.9, yaitu menjamin identitas hukum bagi semua warga tanpa terkecuali. Selain itu, ketersediaan data kependudukan yang akurat juga semakin relevan dalam konteks global, terutama untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta mitigasi dampak mobilitas penduduk akibat perubahan iklim dan krisis kemanusiaan.

Pada tingkat nasional, isu strategis berkaitan erat dengan agenda transformasi digital, birokrasi bersih, dan pelayanan publik berbasis data yang menjadi prioritas pemerintah. Batam sebagai daerah dengan mobilitas penduduk yang tinggi dituntut untuk mampu mengintegrasikan kualitas data kependudukan dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam mengoptimalkan bonus demografi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, di tingkat regional, masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya tata kelola layanan berbasis TIK di Provinsi Kepulauan Riau, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data, serta belum meratanya cakupan layanan *adminduk* di seluruh wilayah hinterland Batam.

Isu-isu lingkungan dinamis ini menunjukkan bahwa peran Disdukcapil Batam tidak hanya sebatas pada pelayanan dokumen kependudukan, tetapi juga sebagai pilar strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang

baik (*good governance*), transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan analisis kritis, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam antara lain:

1. Belum meratanya cakupan administrasi kependudukan di seluruh wilayah;
2. Kualitas dan integrasi data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan lintas sektor.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan.

Berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun program kerja yang diarahkan untuk merespons hal-hal berikut:

1. Optimalisasi tata kelola layanan administrasi kependudukan berbasis TIK agar lebih inklusif, cepat, dan tepat sasaran.
2. Peningkatan kualitas, integrasi, dan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pembangunan lintas sektor.
3. Penguatan inklusi layanan adminduk bagi seluruh penduduk, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas hingga ke satuan pelayanan kecamatan.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan melalui sosialisasi, edukasi, dan pemanfaatan kanal layanan digital yang mudah diakses.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026  
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)			
		Urusan	: Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			Urusan	: Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
		Bidang Urusan	: Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		100%	23.008.571.265,00	Bidang Urusan	: Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			23.766.444.442		
1	2.12.01	Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	21.679.709.359,00	Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73,61 % 97 %	19.611.777.142	
	2.12.01.2.01	Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	-	-	Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	5.116.800	
	2.12.01.2.01.0001	Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.414.000	
	2.12.01.2.01.0007	Sub Kegiatan	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	Sub Kegiatan	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	702.800	
	2.12.01.2.02	Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-	13.529.775.140,00	Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	17.399.843.195	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	2.12.01.2.02.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	13.462.595.140,00	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang / Bulan	17.352.483.195	
	2.12.01.2.02.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	47.360.000	
	<b>2.12.01.2.05</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>561.891.000,00</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya</b>	<b>100 %</b>	<b>40.620.000</b>	
	2.12.01.2.05.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	240.385.000,00	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Orang	-	
	2.12.01.2.05.0009	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	321.506.000,00	Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	40.620.000	
	<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.591.237.491,00</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>255.642.647</b>	
	2.12.01.2.06.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.033.000,00	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.170.400	
	2.12.01.2.06.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.979.874.491,00	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	85.621.700	
	2.12.01.2.06.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Sekupang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	48.876.000,00	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Sekupang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.159.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
		Sungai Harapan					Sungai Harapan				
2.12.01.2.06.0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	36.588.000,00	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.870.247	
2.12.01.2.06.0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	496.866.000,00	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	124.821.000	
<b>2.12.01.2.07</b>	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah</b>	<b>100%</b>	<b>1.817.025.000,00</b>	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>	<b>100 %</b>	<b>452.818.900</b>	
2.12.01.2.07.0005	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	-	-	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	42.559.200	
2.12.01.2.07.0006	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	155 Unit	1.817.025.000,00	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	410.259.700	
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.702.276.945,00</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</b>	<b>100 %</b>	<b>1.034.650.000</b>	
2.12.01.2.08.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	75.000.000,00	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	47.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
2.12.01.2.08.002	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	469.920.282,00	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	985.900.000	
2.12.01.2.08.004	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.157.356.663,00	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.500.000	
2.12.01.2.09	Kegiatan	: <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Jabatan</b>	100%	477.503.783,00	Kegiatan	: <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</b>	100 %	423.085.600	
2.12.01.2.09.001	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.780.000,00	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.380.000	
2.12.01.2.09.002	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	184.750.000,00	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	208.450.000	
2.12.01.2.09.006	Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	101.079.996,00	Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	40.600.000	
2.12.01.2.09.009	Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149.893.787,00	Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	133.655.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
2	2.12.02	Program : Pendaftaran Penduduk		Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100%	612.448.573,00	Program	: Pendaftaran Penduduk		Persentase penduduk yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk secara Sah berdasarkan peraturan perundangundangan	60%	3.884.133.000	
	2.12.02.2.01	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	100%	528.932.858,00	Kegiatan	: Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	100 %	3.536.152.600	
	2.12.02.2.01.0001	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	116.616.000,00	Sub Kegiatan	: Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	8.448.000	
	2.12.02.2.01.0002	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	160.0000 Dokumen	412.316.858,00	Sub Kegiatan	: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	165000 Dokumen	3.527.704.600	
	2.12.02.2.02	Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk		Persentase penduduk yang dilayani dokumen kependudukan sesuai ketentuan	-	-	Kegiatan	: Penataan Pendaftaran Penduduk		Persentase penataan dokumen pendaftaran penduduk yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	344.264.000	
	2.12.02.2.02.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	-	-	Sub Kegiatan	: Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	24600 Dokumen	344.264.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	2.12.02.2.03	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %	83.515.715,00	Kegiatan	: Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %	3.716.400	
	2.12.02.2.03.005	Sub Kegiatan : Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	83.515.715,00	Sub Kegiatan	: Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	3.716.400	
3	2.12.03	Program : Pencatatan Sipil		Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	100%	473.255.715,00	Program	: Pencatatan Sipil		Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan	99,47 %	213.432.200	
	2.12.03.2.01	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	100%	389.740.001,00	Kegiatan	: Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	100 %	187.637.200	
	2.12.03.2.01.001	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	42.000 Dokumen	389.740.001,00	Sub Kegiatan	: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	32802 Dokumen	187.637.200	
	2.12.03.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	83.515.714,00	Kegiatan	: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	25.795.000	
	2.12.03.2.02.008	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	83.515.714,00	Sub Kegiatan	: Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	25.795.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
4	2.12.04	Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	100%	243.157.618,00	Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	55,56 %	22.700.400	
	2.12.04.2.01	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama	100%	178.166.858,00	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Persentase pemangku kepentingan yang memanfaatkan dokumen dan data kependudukan melalui melakukan kerjasama	100 %	9.084.000	
	2.12.04.2.01.0002	Sub Kegiatan : Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	178.166.858,00	Sub Kegiatan : Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	9.084.000	
	2.12.04.2.03	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	64.990.760,00	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	3.716.400	
	2.12.04.2.03.0005	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	64.990.760,00	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	3.716.400	
	2.12.04.2.04	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		-	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Terealisasi	100 %	9.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)		
	2.12.04.2.04.003	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	9.900.000	
5	2.12.05	Program : Pengelolaan Profil Kependudukan		Persentase data yang dapat disajikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100 %		Program : Pengelolaan Profil Kependudukan		Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan	77,27 %	34.401.700	
	2.12.05.2.01	Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan		Persentase penyajian data Kependudukan	100 %		Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan		Persentase profil kependudukan yang berhasil disusun dalam satu tahun	100 %	34.401.700	
	2.12.05.2.01.002	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen		Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	50 Dokumen	34.401.700	
	TOTAL :				23.008.571.265,00		TOTAL :				23.766.444.442	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *top down* dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah:

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
<b>NIHIL</b>					

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045 menggariskan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 yaitu “*Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan*” yang pelaksanaan melalui empat tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang ke-1 yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan Visi “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”.

Penyusunan Renja Tahun 2026 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, adapun arah kebijakan pembangunan untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

#### 1. Prioritas Nasional

Dalam kerangka kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mendukung Misi 1, yaitu *Transformasi Sosial* dengan tujuan *Indonesia Emas Ketiga (IE-3)* melalui perlindungan sosial yang adaptif. Perlindungan Sosial yang Adaptif. Upaya transformasi sosial dalam perlindungan sosial adaptif mencakup implementasi **Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi**, yang diturunkan dalam kerangka Sinkronisasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati dengan langkah-langkah:

#### 1. Layanan adminduk yang terpadu antar kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah;

Melalui percepatan cakupan administrasi kependudukan, mencakup: Perluasan jangkauan pelayanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri, mencakup: (a) Pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan serta layanan di seluruh kantor Perwakilan Republik Indonesia; (b) Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat; (c) Pengembangan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor; dan (d) Keterhubungan antar sistem informasi di berbagai lembaga pemerintah.

#### 2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan;

Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mencakup: (a) Pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi; dan (b) Pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong penduduk dan WNI di luar negeri untuk melaporkan peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

#### 3. Tata kelola data kependudukan yang berkualitas;

##### a. Penerapan Sistem SIAK Terpusat

Dalam menghadirkan data kependudukan yang kualitas, sejak tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menerapkan perubahan kebijakan dari Sistem SIAK Terdistribusi kepada Sistem SIAK Terpusat.

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam termasuk Kabupaten/Kota yang paling awal menerapkan dan menjalankan Sistem SIAK Terpusat.
- b. Masifkan penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) Sebagai langkah transformasi digitalisasi data kependudukan yang berkualitas serta mengurangi penggunaan plastik/blanko dan kertas dalam mendukung komitmen G20 dan menjawab tantangan SDGs (*Sustainable Development Goals*), sejak tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menghadirkan sebuah terobosan dengan menghadirkan IKD (Identitas Kependudukan Digital) dengan mudah di akses melalui Smartphone.
4. Integrasi sistem administrasi kependudukan dengan sistem layanan publik lainnya, mencakup:
    - a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mencakup: (a) Penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor; dan (b) Pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
    - b. Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar-kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, mencakup: (a) Penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang menyeluruh dan selaras antar sektor; dan (b) Penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.
  5. Pemanfaatan data adminduk untuk perencanaan pembangunan

Sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, administrasi kependudukan mendukung **Program Nasional 6**, yaitu *Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan*, melalui sinkronisasi data administrasi kependudukan dan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan terintegrasi dalam satu sistem registrasi sosial ekonomi. Selain itu, administrasi kependudukan juga mendukung **Program Nasional 7**, yaitu *Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan*, melalui kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang selaras dengan reformasi di bidang politik.

## 2. Prioritas Provinsi

Pada tingkat provinsi, arah pembangunan Kepulauan Riau Tahun 2026 berada dalam penahapan RPJMD Kepulauan Riau 2025–2029 dengan visi “*Kepulauan Riau yang Maju, Makmur, dan Merata.*” Tata kelola administrasi kependudukan tercantum pada misi ke-4, yaitu “*Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi, dan Berorientasi Pelayanan.*” dengan isu strategis “*Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.*” Salah satu program prioritas terkait adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga secara vertikal maupun horizontal, serta pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi untuk perekaman dan pendataan penduduk.

## 3. Prioritas Daerah

Hal yang sama tercermin dalam arah pembangunan Kota Batam Tahun 2026, merupakan tahun ke-2 dalam RPJMD Kota Batam 2025-2029 di mana administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mendukung **Misi ke-4 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance*”**, melalui

Sasaran 4.1. **Meningkatnya pelayanan publik.** Program ini diwujudkan melalui peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi pada bidang pelayanan publik, khususnya dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah dokumen kependudukan dan data kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Berdasarkan hal tersebut ditetapkan output yang menjadi indikator kinerja kunci meliputi:

1. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan;
2. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan;
3. Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan;
4. Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan;
5. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak;
6. Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun;
7. Persentase Kepemilikan Identitas Digital.

Yang diterjemahkan dalam kegiatan pelayanan teknis dengan memperhatikan fokus arah kebijakan pelayanan publik antara lain:

1. Penguatan tata kelola internal organisasi melalui perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana yang efisien;
  - a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang adminduk,
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk,
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan adminduk melalui inovasi,
2. Optimalisasi manajemen kinerja berbasis teknologi informasi.
3. Perluasan aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan Adminduk di seluruh wilayah Kota Batam.
  - a. Jemput Bola di berbagai kantong pemukiman penduduk yang masih banyak belum melakukan perekaman termasuk membuka pelayanan perekaman KTP el di berbagai event tingkat daerah maupun regional,
  - b. Perluasan akses layanan sampai ke satuan pelayanan kecamatan.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan pelayanan jemput bola.
5. Penguatan mutu layanan administrasi kependudukan
  - a. Mendorong daerah untuk optimalisasi penerapan pelayanan berbasis digital,
  - b. Kebijakan penambahan waktu pelayanan/jam pelayanan di luar pelayanan kantor,
  - c. Pelaksanaan pelayanan pada hari libur sabtu minggu dan hari libur nasional sesuai dengan ketentuan
  - d. Peningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Anak Usia 0 s.d 24 Bulan,
  - e. Peningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan NIK bagi penduduk
  - f. menyelenggarakan kegiatan yang mendukung suksesnya gerakan indonesia adminduk (GISA) bertajuk Dukcapil Prima.
6. Penguatan manajemen data kependudukan berbasis teknologi dan integrasi lintas sector;
  - a. Fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kab/Kota dengan OPD lain untuk pemanfaatan database kependudukan;
  - b. Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan (MoU dan PKS);
  - c. Konfigurasi jaringan dan database Kependudukan dalam rangka pemanfaatan data tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7. Pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik oleh pemangku kepentingan.

Yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peraturan undang-undang yang berlaku lainnya. Berdasarkan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam secara spesifik sudah mengintegrasikan sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025- 2029. Adapun tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”**

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah bagi masyarakat Kota Batam
3. Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku kepentingan (stakeholder)

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mengacu pada Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Sasaran: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan daerah  <b>Indikator:</b> Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [Poin]	92.16
2	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</b>	Sasaran: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah bagi masyarakat Kota Batam  <b>Indikator:</b> Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil [%]	79.73
3		Sasaran: Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku kepentingan (stakeholder)	66

		<b>Indikator:</b> Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif Memanfaatkan Dokumen Dan Informasi Kependudukan	
--	--	--	--

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025-2029 yang dirinci dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029 Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi Ke-4 Kota Batam Tahun 2025-2029 yakni *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Good Governance*. Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusulkan 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan, 30 (tiga puluh) sub kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 23.766.444.441,65,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu koma enam puluh lima rupiah). Adapun program dan kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
    2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
    2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pendaftaran Penduduk
    - a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
      1. Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
      2. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
    - b. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
      1. Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
    - c. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
      1. Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
  3. Program Pencatatan Sipil
    - a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
      1. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
    - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
      1. Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
  4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
      1. Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
    - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
      1. Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
      1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
  5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
    - a. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan
      1. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027  
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Urusan	:	Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			-	-			
	Bidang Urusan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			23.766.444.442	-		25.295.033.565	
2.12.01	Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		73,61 97	19.611.777.142	-	74,61 98	20.897.426.265
2.12.01.2.01	Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		100 %	5.116.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	10.320.000
2.12.01.2.01.0001	Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	2 Dokumen	4.414.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	5.160.000
2.12.01.2.01.0007	Sub Kegiatan	:	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	3 Laporan	702.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	5.160.000
2.12.01.2.02	Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100 %	17.399.843.195	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
2.12.01.2.02.0001	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	105 Orang / Bulan	17.352.483.195	DANA ALOKASI UMUM (DAU) & PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	105 Orang / Bulan	17.953.375.417
2.12.01.2.02.0002	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	12 Dokumen	47.360.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	50.120.000
2.12.01.2.02.0003	Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-
<b>2.12.01.2.05</b>	<b>Kegiatan</b>	:	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya</b>		<b>100 %</b>	<b>40.620.000</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100 %</b>	<b>134.340.000</b>
2.12.01.2.05.0002	Sub Kegiatan	:	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	85.260.000
2.12.01.2.05.0009	Sub Kegiatan	:	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	5 Orang	40.620.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Orang	49.080.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
2.12.01.2.06	Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100 %	255.642.647	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	304.029.033
2.12.01.2.06.0001	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	1 Paket	18.170.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	19.792.000
2.12.01.2.06.0002	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	4 Paket	85.621.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Paket	95.522.000
2.12.01.2.06.0004	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	1 Paket	10.159.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	10.536.000
2.12.01.2.06.0005	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	1 Paket	16.870.247	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	13.423.033
2.12.01.2.06.0009	Sub Kegiatan	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	124.821.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	164.756.000
2.12.01.2.07	Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100 %	452.818.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	668.854.565

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
2.12.01.2.07.0005	Sub Kegiatan	:	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	42.559.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21 Unit	66.294.000
2.12.01.2.07.0006	Sub Kegiatan	:	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Unit	410.259.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38 Unit	602.560.565
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Kegiatan</b>	:	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</b>		<b>100 %</b>	<b>1.034.650.000</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100 %</b>	<b>1.350.870.000</b>
2.12.01.2.08.0001	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	1 Laporan	47.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	40.500.000
2.12.01.2.08.0002	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	4 Laporan	985.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	997.650.000
2.12.01.2.08.0004	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	2 Laporan	1.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	312.720.000
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Kegiatan</b>	:	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</b>		<b>100 %</b>	<b>423.085.600</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100 %</b>	<b>425.517.250</b>

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
2.12.01.2.09.0001	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	1 Unit	40.380.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	40.380.000
2.12.01.2.09.0002	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	5 Unit	208.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	213.209.000
2.12.01.2.09.0006	Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	76 Unit	40.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	117 Unit	171.928.250
2.12.01.2.09.0009	Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	1 Unit	133.655.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	-
<b>2.12.02</b>	<b>Program</b>	:	<b>Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk secara Sah berdasarkan peraturan perundangundangan</b>		<b>60%</b>	<b>3.884.133.000</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>62,33 %</b>	<b>4.014.725.300</b>
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Kegiatan</b>	:	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan</b>		<b>100 %</b>	<b>3.536.152.600</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100 %</b>	<b>3.621.025.300</b>

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
2.12.02.2.01.0001	Sub Kegiatan	:	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	8.448.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	10.992.000
2.12.02.2.01.0002	Sub Kegiatan	:	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165000 Dokumen	3.527.704.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	172500 Dokumen	3.610.033.300
<b>2.12.02.2.02</b>	<b>Kegiatan</b>	:	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase penataan dokumen pendaftaran penduduk yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</b>		<b>100 %</b>	<b>344.264.000</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
2.12.02.2.02.0002	Sub Kegiatan	:	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24600 Dokumen	344.264.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26900 Dokumen	377.863.000
<b>2.12.02.2.03</b>	<b>Kegiatan</b>	:	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>		<b>100 %</b>	<b>3.716.400</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
2.12.02.2.03.0005	Sub Kegiatan	:	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	1 Laporan	3.716.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	15.837.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
2.12.03	Program	:	Pencatatan Sipil			99,47 %	213.432.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	99,49 %	275.274.000
2.12.03.2.01	Kegiatan	:	Pelayanan Pencatatan Sipil			100 %	187.637.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	224.116.000
2.12.03.2.01.0001	Sub Kegiatan	:	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32802 Dokumen	187.637.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33302 Dokumen	224.116.000
2.12.03.2.02	Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		100 %	25.795.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	51.158.000
2.12.03.2.02.0008	Sub Kegiatan	:	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25.795.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	51.158.000
2.12.04	Program	:	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan		56 %	22.700.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	66,67 %	46.024.000
2.12.04.2.01	Kegiatan	:	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemangku kepentingan yang memanfaatkan dokumen dan data kependudukan melalui melakukan kerjasama		100 %	9.084.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	18.580.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
2.12.04.2.01.0002	Sub Kegiatan	:	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	10 Dokumen	9.084.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	18.580.000
2.12.04.2.03	Kegiatan	:	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		100 %	3.716.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	11.604.000
2.12.04.2.03.0005	Sub Kegiatan	:	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.716.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	11.604.000
2.12.04.2.04	Kegiatan	:	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Terealisasi</b>		100 %	9.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	15.840.000
2.12.04.2.04.0003	Sub Kegiatan	:	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	9.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	15.840.000
2.12.05	Program	:	<b>Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan</b>		77%	34.401.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84,09 %	61.584.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
2.12.05.2.01	Kegiatan	:	Penyusunan Profil Kependudukan		100 %	34.401.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	61.584.000
2.12.05.2.01.0002	Sub Kegiatan	:	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Dokumen	34.401.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Dokumen	61.584.000
<b>TOTAL</b>							<b>23.766.444.442</b>			<b>25.295.033.565</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada perencanaan Tahun 2026 merupakan tahun ke-5 dalam Renstra Tahun 2025-2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan, 30 (tiga puluh) sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16	17
		<b>Urusan</b> : Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			-						
		<b>Bidang Urusan</b> : Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			23.766.444.442					25.295.033.565	
1	2.12.01	<b>Program</b> : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	73,61 % 97 %	19.611.777.142				74,61 % 98 %	20.897.426.265	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01	<b>Kegiatan</b> : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	5.116.800			ASN	100 %	10.320.000	
	2.12.01.2.01.001	<b>Sub Kegiatan</b> : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						ASN			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.414.000	Kota Batam, Sekupan & Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	5.160.000	
	2.12.01.2.01.007	<b>Sub Kegiatan</b> : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						ASN			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	702.800	Kota Batam, Sekupan & Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	5.160.000	
	2.12.01.2.02	<b>Kegiatan</b> : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	17.399.843.195				100 %		
	2.12.01.2.02.001	<b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang / Bulan	17.352.483.195	Kota Batam, Sekupan & Sungai Harapan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) & PENDAPATAN		105 Orang / Bulan	17.953.375.417	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							ASLI DAERAH (PAD)				
	2.12.01.2.02.002	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	47.360.000	Kota Batam, Sekupan & Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	12 Dokumen	50.120.000	
	2.12.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	40.620.000				100 %	134.340.000	
	2.12.01.2.05.002	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Orang	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	1 Paket	85.260.000	
	2.12.01.2.05.009	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	40.620.000	Kota Batam, Sekupan & Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	6 Orang	49.080.000	
	2.12.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	255.642.647			ASN, Masyarakat	100 %	304.029.033	
	2.12.01.2.06.001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.170.400	Kota Batam, Sekupan & Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	1 Paket	19.792.000	
	2.12.01.2.06.002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4 Paket	85.621.700	Kota Batam, Sekupan & Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI	ASN, Masyarakat	4 Paket	95.522.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Kantor yang Disediakan			Sungai Harapan	DAERAH (PAD)				
	2.12.01.2.06.004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.159.300	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	1 Paket	10.536.000	
	2.12.01.2.06.005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.870.247	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	1 Paket	13.423.033	
	2.12.01.2.06.009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	124.821.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	12 Laporan	164.756.000	
	2.12.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	452.818.900				100 %	668.854.565	
	2.12.01.2.07.005	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	42.559.200	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	21 Unit	66.294.000	
	2.12.01.2.07.006	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	410.259.700	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	38 Unit	602.560.565	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.12.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	1.034.650.000				100 %	1.350.870.000	
	2.12.01.2.08.001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	47.250.000	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	1 Laporan	40.500.000	
	2.12.01.2.08.002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	985.900.000	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	4 Laporan	997.650.000	
	2.12.01.2.08.004	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.500.000	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	2 Laporan	312.720.000	
	2.12.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	423.085.600				100 %	425.517.250	
	2.12.01.2.09.001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.380.000	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	1 Unit	40.380.000	
	2.12.01.2.09.002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	208.450.000	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	5 Unit	213.209.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.12.01.2.09.006	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	40.600.000	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	117 Unit	171.928.250	
	2.12.01.2.09.009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	133.655.600	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	0 Unit	-	
2	2.12.02	Program : Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk secara Sah berdasarkan peraturan perundangundangan	60%	3.884.133.000				62,33%	4.014.725.300	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	100%	3.536.152.600			ASN, Masyarakat	100%	3.621.025.300	
	2.12.02.2.01.001	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	8.448.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	12 Dokumen	10.992.000	
	2.12.02.2.01.002	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk									
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	165000 Dokumen	3.527.704.600	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	172500 Dokumen	3.610.033.300	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.12.02.2.02	Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase penataan dokumen pendaftaran penduduk yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	344.264.000			ASN, Masyarakat	100 %		
	2.12.02.2.02.002	Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan									
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	24600 Dokumen	344.264.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	26900 Dokumen	377.863.000	
	2.12.02.2.03	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %	3.716.400				100 %		
	2.12.02.2.03.005	Sub Kegiatan : Sosialisasi Pendaftaran Penduduk									
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	3.716.400	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	1 Laporan	15.837.000	
3	2.12.03	Program : Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan	99,47 %	213.432.200				99,49 %	275.274.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	100 %	187.637.200			ASN, Masyarakat	100 %	224.116.000	
	2.12.03.2.01.001	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	32802 Dokumen	187.637.200	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	33302 Dokumen	224.116.000	
	2.12.03.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	25.795.000			ASN, Masyarakat	100 %	51.158.000	
	2.12.03.2.02.008	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil									
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	25.795.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	1 Laporan	51.158.000	
4	2.12.04	Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	55,56 %	22.700.400				66,67 %	46.024.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemangku kepentingan yang memanfaatkan dokumen dan data kependudukan melalui melakukan kerjasama	100 %	9.084.000			ASN, Masyarakat	100 %	18.580.000	
	2.12.04.2.01.002	Sub Kegiatan : Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	9.084.000	Kota Batam, Sekupan & Sungai Harapan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Lembaga Pengguna	12 Dokumen	18.580.000	
	2.12.04.2.03	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	3.716.400				100 %	11.604.000	
	2.12.04.2.03.005	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	3.716.400	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lembaga Pengguna	1 Laporan	11.604.000	
	2.12.04.2.04	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Terealisasi	100 %	9.900.000			ASN, Masyarakat	100 %	15.840.000	
	2.12.04.2.04.003	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan									
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	9.900.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN, Masyarakat	1 Laporan	15.840.000	
5	2.12.05	Program : Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan	77,27 %	34.401.700				84,09 %	61.584.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01	Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase profil kependudukan yang berhasil disusun dalam satu tahun	100 %	34.401.700			Lembaga Pengguna	100 %	61.584.000	
	2.12.05.2.01.002	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain									
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	50 Dokumen	34.401.700	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lembaga Pengguna	100 Dokumen	61.584.000	
					23.766.444.442					25.295.033.565	

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

### **5.1 Catatan Penting**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan dengan 30 (tiga puluh) jenis sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2026.

### **5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025-2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026).

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD